

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujukan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Andrie Fajar Halyb (2019) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe	Kualitatif	Kuasa Pengguna anggaran (KPA) tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang diembannya, sehingga menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Undang-undang keuangan pemerintah nomor 17 tahun 2003 belum menyesuaikan	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPU Perbedaan : terletak pada Obyek dan

			<p>sistem pengelolaan keuangan dengan model kelembagaan seperti KPU. Sosialisasi regulasi kurang tepat sasaran dan minat oleh KPA untuk menghadiri sosialisasi terkait pengelolaan keuangan oleh KPPN kurang. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan lebih disosialisasikan ditingkat bawah. Apabila ada undangan untuk KPA lebih sering diwakilkan oleh staf pengelola keuangan</p>	<p>tahun penelitian</p>
2	<p>Jessie Christy Natalia Duinkerken (2023)</p>	Kualitatif	<p>(1) Pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah tahun</p>	<p>Persamaan : Sama-sama meneliti</p>

	<p>Analisis Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan</p>		<p>2020 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (2) Terdapat beberapa temuan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Sulawesi Utara pemilihan kepala daerah tahun 2020 (3) Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.</p>	<p>tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPU Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian</p>
3	Dahlia (2019)	Kualitatif	pelaksanaan	Persamaan :

	<p>Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)</p>		<p>akuntabilitas partai politik berada pada kategori cukup yang artinya bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan akuntabilitas utamanya dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawabannya, dan pelaksanaan transparansi partai politik berada pada kategori cukup yang artinya bahwa informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat masih perlu</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPU</p> <p>Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian</p>
--	---	--	--	--

			<p>ditingkatkan. Informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada partai masih perlu ditingkatkan, transparansi yang dilakukan oleh partai akan dapat mempengaruhi pemberian pilihan suaranya dalam Pemilu.</p>	
4	Suci (2023) Akuntabilitas	Kualitatif	Proses pengelolaan keuangan KPU	Persamaan : Sama-sama

	<p>Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Pada Pilkada Tahun 2020.</p>		<p>Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan pada tahap pelaporan, karena bendahara memangkas beberapa tugas unit pengelola keuangan lainnya dalam pencairan dan penggunaan anggaran. Pemangkas tugas yang dilakukan bendahara mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Bengkalis menjadi bermasalah, karena prosedur pengelolaan keuangan tidak berjalan sesuai aturan. Pelaksanaan dimensi akuntabilitas hukum dan</p>	<p>meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPU Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun</p>
--	--	--	---	--

			<p>kejujuran tidak berjalan dengan optimal, karena seluruh bagian pengelola keuangan kurang memahami aturan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi masing-masing unit. Akuntabilitas proses juga bermasalah, karena bendahara tidak melaksanakan pengelolaan keuangan secara sistematis.</p> <p>Banyak tahapan administrasi yang dilewati dan tidak sesuai dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Berbeda dengan akuntabilitas</p>	
--	--	--	---	--

			<p>program yang berhasil dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap persiapan hingga akhir pemilihan. Akuntabilitas kebijakan juga menimbulkan permasalahan karena adanya kebijakan satu pintu yang dibuat oleh ketua KPU dalam mengelola anggaran yang tersedia.</p>	
5	<p>Aprillia Maryam Sodikin (2023) Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun</p>	Kualitatif	<p>Dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Tahun 2020, sejauh ini sistem pengelolaan dana hibah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.</p>	<p>Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPU Perbedaan :</p>

	2020			terletak pada Obyek dan tahun penelitian
6	Ana Sabhana Azmy (2022) Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019	Kualitatif	KPU telah memenuhi prinsip akuntabilitas dalam penerapan SIPOL dilihat dari penyajian informasi, sosialisasi massif dan informasi yang jelas pada stakeholder. KPU juga telah melakukan prinsip transparansi, partisipasi dan responsivitas. Namun demikian, KPU belum maksimal dalam menerapkan satu prinsip akuntabilitas yakni pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Meski SIPOL belum sempurna,	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPU Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian

			namun penerapan SIPOL merupakan langkah baik bagi demokratisasi di Indonesia.	
--	--	--	---	--

Kajian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya memiliki perbedaan dengan kajian yang dilakukan peneliti saat ini, dimana penelitian ini akan menjelaskan proses pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Jombang pada tahapan pilpres dan pileg tahun 2023-2024.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir sama. Namun dalam

tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2020), akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Halim (2019).

2.2.1.2 Peran Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting, antara lain :

1. Meningkatkan transparansi

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi keuangan pemerintah. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan negara.

2. Menyediakan informasi keuangan yang akurat

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan melalui akuntansi sektor publik harus akurat dan dapat dipercaya. Informasi ini penting

tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga bagi pihak-pihak terkait, seperti investor, kreditur dan lembaga pemantau. Laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko keuangan.

3. Mengukur kinerja pemerintah

Melalui akuntansi sektor publik, pemerintah dapat mengukur kinerja mereka dalam pengelolaan keuangan, ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi program-program yang telah diimplementasikan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik membantu pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.

2.2.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Beberapa karakteristik utama akuntansi sektor publik yang membedakan dari akuntansi sektor swasta meliputi :

1. Tujuan publik

Akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, bukan pemilik atau investor

2. Transparansi

Pemerintah dan entitas sektor publik harus memenuhi prinsip transparansi dalam pelaporan keuangannya. Ini mencakup keterbukaan dalam penyediaan informasi keuangan kepada publik.

3. Pengaturan dan standar

Akuntansi sektor publik sering kali diatur oleh aturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur, seperti *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*

4. Keterbatasan keuntungan finansial

Entitas sektor publik biasanya tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba, seperti yang terdasi dalam bisnis swasta namun pada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik.

5. Sumber dana yang beragam

Akuntansi sektor publik mengelola berbagai sumber dana termasuk pajak, pinjaman dan hibah.

2.2.1.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association* (1970) dinyatakan dalam berikut ini :

1. Manajemen kontrol

Manajemen kontrol adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan yang tepat, efisien dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang, divisi ataupun sumber daya yang berada

di bawah naungannya. Selain itu juga bertujuan melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.

Sementara itu menurut kerangka konseptual akuntansi sektor publik menerangkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat menjelaskan tentang berbagai informasi yang memiliki manfaat untuk menilai akuntabilitas dan pembuat keputusan yang tepat. Beberapa tujuan akuntabilitas publik :

- a. Memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan periode berjalan sebagai pembiayaan semua pengeluaran.
- c. Menginformasikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pembuat laporan sekaligus hasilnya yang sesuai.
- d. Menginformasikan posisi keuangan sesuai dengan kondisi entitas pembuat laporan sesuai dengan sumber penerimaan dalam jangka pendek maupun Panjang.

2.2.1.5 Jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sector public dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah :

1. Akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintah dalam penerapannya menggunakan data akuntansi sebagai informasi yang berkaitan dengan berbagai transaksi

ekonomi dan keuangan pemerintah yang diberikan kepada pihak eksekutif, legislative, yudikatif dan masyarakat di dalamnya.

Pada akuntansi pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Sementara itu pada akuntansi pemerintah daerah masih dibedakan menjadi akuntansi provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota.

2. Akuntansi sosial

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit dan nirlaba yang dijalankan khusus untuk lembaga makro seperti partai politik, masjid dan berbagai lembaga masyarakat lainnya.

2.2.1.6 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dibentuk karena munculnya berbagai faktor-faktor pendukung yang membantu proses pembentukannya. Sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan di Indonesia menjadi faktor yang pertama. Maka dari itu muncullah sistem akuntansi sektor publik yang penerapannya berada di bawah pengaruh lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif dalam kondisi check and balance. Faktor yang kedua adalah sumber daya yang secara tidak langsung berkaitan dengan hasilnya. Dan faktor terakhir berpengaruh adalah kondisi politik negara yang menimbulkan negoisasi diantara lembaga pemerintah dan legislatif.

Akuntansi sektor publik telah terbukti memiliki peranan yang penting dalam sistem pemerintahan dan menjadi tulang punggung perekonomian negara.

Apabila terjadi pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik dalam pemerintahan akan berdampak pada kekosongan pengaturan praktik- praktik akuntansi di sektor itu sendiri.

Ruang lingkup pada akuntansi sektor publik lebih luas jika dibandingkan dengan sektor swasta. Bidang ilmu akuntansi sektor publik ini melingkupi ruang yang luas demi kepentingan bersama. Akuntansi sektor publik melingkupi beberapa aspek seperti:

1. Perencanaan anggaran, menentukan sumber pendanaan dan alokasi dana untuk program dan proyek pemerintah.
2. Pencatatan Keuangan, mencatat setiap transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana publik.
3. Pelaporan Keuangan, menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan entitas sektor publik.
4. Audit dan Pemeriksaan, melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik.
5. Pertanggungjawaban, entitas sektor publik harus bertanggungjawab kepada pemegang kepentingan dan masyarakat umum atas penggunaan dana publik.

Selain itu akuntansi sektor publik mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara serta departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi lainnya. Namun organisasi sektor publik sangat dibatasi hanya untuk organisasi yang

menggunakan dana masyarakat. Maka dari itu akuntansi sektor publik hanya mencakup bidang utama sebagai berikut:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Partai Politik
4. Akuntansi LSM
5. Akuntansi Yayasan
6. Akuntansi Pendidikan
7. Akuntansi Kesehatan
8. Akuntansi Tempat Peribadatan

2.2.2 Konsep Akuntabilitas

2.2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2020) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Wabster dan Waluyo (2017) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggung jaawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah: Pertama, dapat dipertanggungjawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada Tuhannya atas apa yang telah ia lakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggun jawabkan secara

ekplinsit, dan yang ketiga, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan.

Carino dalam (Adisasmita, 2018) menyatakan Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian setiap individu harus betul-betul menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Sehingga memperhatikan lingkungan menjadi mutlak dalam setiap tindak dan laku seseorang pejabat pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, oleh sebab itu dapat penulis simpulkan bahwa, pada intinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2.2 Jenis- jenis Akuntabilitas

Adisasmita (2018), akuntabilitas merupakan sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi:

1. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas

spiritual seperti itu, tidak cukup waktu, tidak cukup sumberdaya, dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas sesungguhnya.

2. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungannya baik formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Ada atasan, ada pengawasan, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-penyimpangan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang berkepedulian sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch* dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

2.2.2.3 Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood, 1993 dalam (Mardiasmo, 2020) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik berikut ini :

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Akuntabilitas Kebijakan berkaitan dengan masalah penanggungjawaban.

Pertanggungjawaban adalah bagian dari sistem akuntansi pemerintahan pusat. Adapun tujuannya menurut sujarweni (2015) sebagai berikut:

- a. Melindungi Kekayaan pemerintah pusat dan instansi- instansinya dengan pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah yang konsistensesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
 - b. Memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya tentang keuangan pemerintah pusat, sebagai dasar penilaian kinerja, dan untuk menentukan ketaatan pada anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
 - c. Memberikan informasi keuangan yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah.
3. Akuntablitas Program, Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
 4. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah posedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan *input* menjadi *output*. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Hasibuan (2020) Manajemen diartikan mengatur, maka apa yang diatur? kenapa harus diatur? siapa yang mengatur? Bagaimana mengaturnya? Dimana harus diatur? Hasibuan (2020) Manajemen dapat diartikan suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Pengelolaan keuangan pemerintah, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan pemerintah yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Saidi (2018) menyatakan pengelolaan keuangan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan dalam instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan pemerintah adalah keseluruhan

kegiatan pejabat pengelola keuangan pemerintah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan terdapat asas-asas pengelolaan keuangan pemerintah yang terdapat dalam undang-undang keuangan pemerintah, namun asas tersebut bukan sebagai suatu norma hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat tetapi memiliki kekuatan moral yang boleh dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti :

1. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
2. Asas Universalitas, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
3. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.

4. Asas Spesialitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan

2.2.4 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Elwood, 1993 dalam (Mardiasmo, 2020) dalam mengukur pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Indikator ini diajukan untuk mengeksplorasi apa yang menjadi kesenjangan antara kewenangan dan pelaksanaan tanggung jawab secara bertahap. Indikator tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
 - a. Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara.
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan negara.
2. Akuntabilitas Proses.
 - a. Kesesuaian pengelolaan keuangan dengan prosedur yang berlaku.
 - b. Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan.
3. Akuntabilitas Program
 - a. Kesesuaian program yang dibiayai oleh anggaran dengan kebutuhan satuan kerja.

- b Pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas Kebijakan
- a Penyusunan Anggaran satuan kerja.
 - b Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

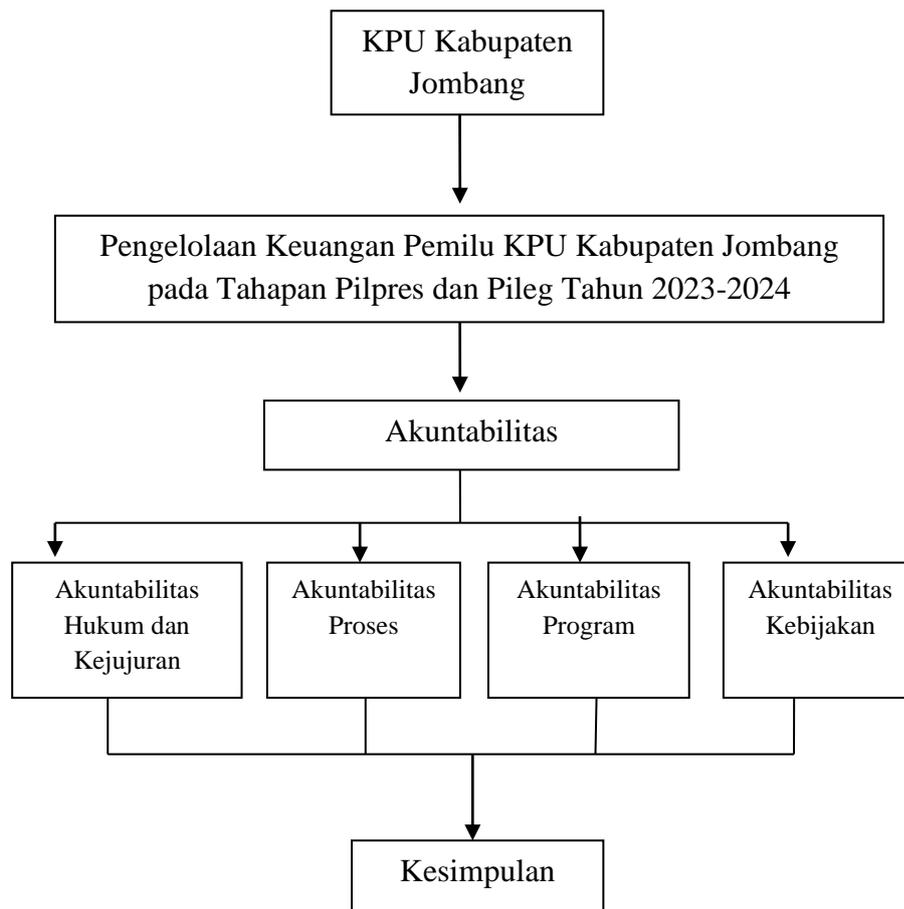
Menurut Dadang Solihin (2017) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur

2.3

Kerangka Penelitian

Kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual